



#2024
KKP BEYOND



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pohon Kinerja

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya Kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Pohon Kinerja ini disusun sebagai penjabaran Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang terperinci dan digunakan sebagai dasar Perjanjian Kinerja berjenjang dengan penyusunan selaras yang sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Semoga Pohon Kinerja ini dapat memberikan gambaran kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan perikanan tangkap.

Jakarta, 4 Januari 2024

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Agus Suherman

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Kesejahteraan Masyarakat KP Meningkat	
Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	63,87 (indeks)



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Kesejahteraan Nelayan Meningkat	
Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	108



-

Level 2

Dit. PDK

Rencana Aksi/ Rencana Kerja MPH

- Supervisi dan Evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan
- Evaluasi dan supervisi pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
- Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan
- Supervisi dan Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan (KUB dan Koperasi)
- Supervisi dan Evaluasi penyaluran dan pemanfaatan bantuan pengembangan prasarana kelompok nelayan dalam rangka pembentukan korporasi nelayan
- Koordinasi dan pelaporan identifikasi bidang tanah nelayan yang akan difasilitasi sertifikatnya
- Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi penguatan kapasitas kelembagaan nelayan
- Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya

Keterlibatan Pihak Eksternal

- Badan Pusat Statistik**
Verifikasi dan rilis resmi data akhir NTN
- Kementerian Koperasi**
Pembinaan Koperasi
- Perbankan**
Akses permodalan
- PERTAMINA/BPH Migas**
Penyaluran BBM nelayan
- BRSDM**
Peningkatan kapasitas nelayan
- PDS**
Peningkatan nilai tambah produk perikanan
- BLU**
Akses pendanaan

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan	
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	≤ 80 (persen)

Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 80

-

Level 2

Dit. PSDI

Dit. KAPI

Rencana Aksi/ Rencana Kerja MPH

- Penyusunan dan Reviu Kebijakan Teknis tentang Log Book Penangkapan Ikan
- Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan
- Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan
- Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur

- Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan

Keterlibatan Pihak Eksternal

- BRIN**
Pengolahan dan verifikasi perhitungan data potensi
- Perguruan Tinggi**
Kajian ilmiah perhitungan data potensi
- Asosiasi**
Kontributor data

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Tata Kelola SDKP Bertanggung Jawab	
WPPNRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur	11 (WPP)

Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab	
WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Dit. PSDI	
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	
Persentase zona penangkapan ikan yang telah dihitung alokasi kuotanya (persen)	100

Dit. KP	
Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	
Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	6
Persentase Pembangunan SKPT (Persen)	85
Dit. KAPI	
Pemenuhan prasarana pemungutan PNBPN perikanan tangkap yang optimal	
Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	296

Dit. PSDI	
Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Meningkat	
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	Target UPT

Dit. PDK	
Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	
Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan Ikan (persen)	95
Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100
Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	90

Dit. KAPI	
Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	
Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.200
Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	1.500

Keterlibatan Pihak Eksternal

Kemenkumham-Setneg-Setkab
Penyelesaian peraturan

POLAIR-TNI AL
Pengawasan usaha penangkapan

Pemda
Sinkronisasi tata kelola perikanan

Perguruan Tinggi
Pengajaran, penelitian, pengabdian

Pelaku Usaha
Kepatuhan implementasi

Biro Hukum
Penyelesaian peraturan

PSDKP
Pengawasan usaha penangkapan ikan

PDS
Dukungan sarpras rantai dingin di pelabuhan perikanan

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Industrialisasi KP Berdaya Saing	
Produksi Perikanan	30,85 juta ton

Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat	
Produksi perikanan tangkap (juta ton)	6

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Dit. PDK	
Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	
Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	10.000
Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan (persen)	35,11
Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100
Korporasi nelayan yang dikembangkan	
Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah kelompok)	10

Dit. PSDI	
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	
Persentase posisi/ rekomendasi/ prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)	100
Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	80
Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	77
Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	75
Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)	100
Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	
Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen)	100
Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)	211

Keterlibatan Pihak Eksternal

Kementerian Perhubungan Dokumen kapal
Kementerian Koperasi Pembinaan Koperasi
Perbankan Akses permodalan
PERTAMINA/BPH Migas Penyaluran BBM nelayan
Pemda Pengumpulan data produksi
BRSDM Peningkatan kapasitas nelayan
PDS Dukungan sarpras rantai dingin di pelabuhan perikanan
BLU Akses pendanaan
Pusdatin Validasi data produksi

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Dit. KAPI	
Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	
Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30
Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3
Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	17.000
Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1
Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	90
Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	
Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)	10
Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10

Dit. KP	
Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	
Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	78
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	77
Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	78
Pemenuhan prasarana pemungutan PNB perikanan tangkap yang optimal	
Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	89
Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	90
Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	100
Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	100
Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	296

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

BBPI	
Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	
Persentase Desain Sarana Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap (persen)	100
Persentase Rekomendasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Digunakan Oleh Stake Holders Perikanan Tangkap (persen)	100
Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diusulkan (rekomendasi)	2
Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Diperoleh Dari Perumusan Standar (rekomendasi)	5
Standar Nasional Indonesia (RSNI) Lingkup Perikanan Tangkap Yang Dikaji Ulang (rekomendasi)	4
Persentase Permohonan Sarana Penangkapan Ikan Yang Diuji (persen)	100
Persentase Permohonan Sarana Penangkapan Ikan Yang Disertifikasi (persen)	100
Persentase Kerjasama Yang Implementatif (persen)	100
Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	90
Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	
Persentase Peningkatan Kompetensi Nelayan (persen)	77

UPT PP	
Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Meningkat	
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan (ton)	Target UPT
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing	
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan (nilai)	84
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan (persen)	Target UPT
Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan yang optimal	
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (persen)	Target UPT
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan (nilai)	30,01
Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan	
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan (persen)	Target UPT

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	
Nilai PNBP Sektor KP	4,038 (Triliun)

Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat	
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	3,56

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

UPT PP	
Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan	
Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan (Rp. Juta)	0,06
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (persen)	100

Dit. KAPI	
Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	
Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100

Dit. PSDI	
Tata kelola sumber daya ikan di WPNRI yang bertanggung jawab	
Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	100

Keterlibatan Pihak Eksternal

Kementerian Keuangan
Kebijakan PNBP dan dana bagi hasil

Pemda
Sinergi tata kelola pendapatan pusat dan daerah dari sektor perikanan

Pelaku Usaha
Kepatuhan implementasi

POLAIR-TNI AL
Pengawasan usaha penangkapan

PSDKP
Pengawasan usaha penangkapan ikan

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Dit. PDK	
Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	
Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan (alokasi kapal)	11.000
Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)	6.700
Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	90
Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	2

Dit. KP	
Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	
Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	296
Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	90
Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100
Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	
Tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan	486.686

Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat	
Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap (orang)	298.650

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Dit. PDK	
Tenaga kerja yang terlibat	
Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	238.400

Dit. KP	
Tenaga kerja yang terlibat	
Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan KP	422

Dit. PSDI	
Tenaga kerja yang terlibat	
Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan SDI	211

Dit. KAPI	
Tenaga kerja yang terlibat	
Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan KAPI	59.620

Keterlibatan Pihak Eksternal

- Pusdatin**
Data sekunder terkait perikanan tangkap
- Biro Perencanaan**
Koordinasi perhitungan di level KKP

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80

Keterlibatan Pihak Eksternal

ITJEN
Evaluatur data jumlah rekomendasi hasil pengawasan

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	Dit. PSDI	Dit. KP
Tata kelola Pemerintahan yang baik	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Tata kelola Pemerintahan yang baik
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat PSDI (persen)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat PSDI (persen)
80	80	80
UPT	Dit. KAPI	Dit. PDK
Tata kelola Pemerintahan yang baik	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Tata kelola Pemerintahan yang baik
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan (persen)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat KAPI (persen)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat PDK (persen)
80	80	80

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	0,5



Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100

Keterlibatan Pihak Eksternal

- BPK**
Koordinasi penyelesaian temuan
- ITJEN**
Evaluator internal KKP & fungsi pendampingan
- Biro Keuangan**
Fungsi koordinasi penyelesaian

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80

Dit. PDK	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Dit. PDK (persen)	80

Dit. KAPI	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Dit. KAPI (persen)	80

Keterlibatan Pihak Eksternal

Pemda

Koordinasi pelaksanaan evaluasi bantuan pemerintah/kegiatan di daerah

ITJEN

Evaluatur internal KKP & fungsi pendampingan

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	77,5

Keterlibatan Pihak Eksternal

ITJEN
Evaluator internal KKP & fungsi pendampingan

Biro Umum
Fungsi koordinasi penyelesaian

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80

UPT	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan	80

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80

Keterlibatan Pihak Eksternal

ITJEN

Evaluatur internal KKP & fungsi pendampingan

Biro Umum

Fungsi koordinasi penyelesaian

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80

UPT	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan (persen)	80

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80

Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja)	15

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,3

Seluruh Direktorat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat (indeks)	88,3

UPT	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan (nilai)	45,1
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) (nilai)	80
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan (indeks)	88,3

Keterlibatan Pihak Eksternal

KemenPAN
Koordinasi arah kebijakan dan evaluator tingkat nasional

ITJEN
Evaluator internal KKP & fungsi pendampingan

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



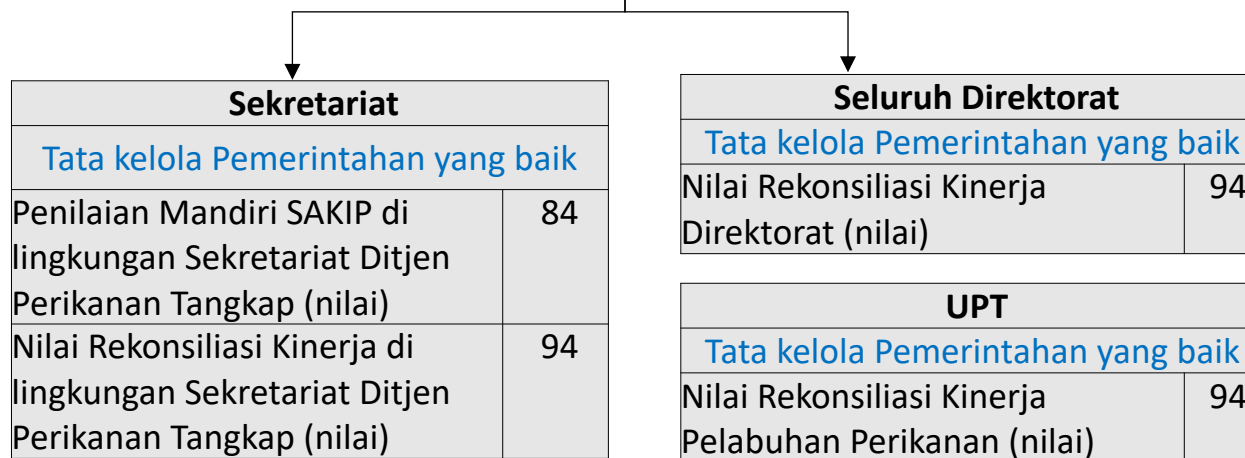
Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	84

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2



Keterlibatan Pihak Eksternal

ITJEN

Evaluatur internal KKP & fungsi pendampingan

Biro Perencanaan

Fungsi pendampingan & evaluatur internal KKP untuk rekonsiliasi kinerja

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	3,3



Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,3

Keterlibatan Pihak Eksternal

ITJEN
Fungsi pendampingan

Biro Keuangan
Fungsi koordinasi penyelesaian & evaluator

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84

Keterlibatan Pihak Eksternal

Biro SDMA
Fungsi koordinasi penyelesaian & evaluator

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84

Seluruh Direktorat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat (indeks)	84

UPT	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan (indeks)	84

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100



Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	100

Keterlibatan Pihak Eksternal

Biro Hukum
Fungsi koordinasi penyelesaian & evaluator

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Persentase unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (persen)	94

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Persentase unit kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (persen)	94
Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)	100
Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	81

Seluruh Direktorat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94

Keterlibatan Pihak Eksternal

Biro KSH

Fungsi koordinasi penyelesaian & evaluator implementasi kerjasama dan publikasi

Pusdatin

Evaluator penerapan sistem manajemen pengetahuan terstandar



Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	76



Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (inovasi)	1

Keterlibatan Pihak Eksternal

KemenPAN

Koordinasi arah kebijakan dan evaluator tingkat nasional

Pusdatin

Evaluator internal KKP & fungsi pendampingan

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	91

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Persentase Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (persen)	100
Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi lingkup di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100

Dit. PDK	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Persentase Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA	100

Keterlibatan Pihak Eksternal

BIG

Koordinasi arah kebijakan data geospasial

Pusdatin

Evaluator internal KKP & fungsi koordinasi penyelesaian

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76

Keterlibatan Pihak Eksternal

Biro Keuangan
Evaluator internal KKP & fungsi koordinasi penyelesaian

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76

Seluruh Direktorat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Persentase Penyerapan Anggaran lingkup Direktorat (persen)	93,76

Seluruh UPT	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Nilai IKPA di Pelabuhan Perikanan (nilai)	93,76

Sasaran Strategis K/L
(Ultimate Outcome)

Level 0

Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	80



Sasaran Program
(Intermediate Outcome)

Level 1

Ditjen Perikanan Tangkap	
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	
Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Keterlibatan Pihak Eksternal

Biro Keuangan
Evaluator internal KKP & fungsi koordinasi penyelesaian

Sasaran Kegiatan
(Immediate Outcome)

Level 2

Sekretariat	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

UPT	
Tata kelola Pemerintahan yang baik	
Nilai Kinerja Anggaran di Pelabuhan Perikanan (nilai)	86



Terima Kasih.
